

# ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV INDAH UTAMA 171

Suryanto Kanadi ([Suryanto\\_Kanadi@yahoo.com](mailto:Suryanto_Kanadi@yahoo.com))

Lili Syafitri ([Lili.Syafitri@rocketmail.com](mailto:Lili.Syafitri@rocketmail.com))

Jurusan Akuntansi

STIE MDP

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 25 pada CV Indah Utama 171. Metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi beberapa bagian pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah CV Indah Utama 171 melakukan kesalahan perhitungan tarif pajak penghasilan pasal 25 dengan masih menggunakan tarif yang lama yang seharusnya CV Indah Utama 171 menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 25 yang terbaru.

**Kata kunci:** PPh Badan

## Abstract

The purpose of this study was to know how the application of income tax article 25 on CV Indah Utama 171. The method used is divided into several sections, namely research approach using a descriptive approach. In this study using interviews and documentation techniques for data collection. Analysis using qualitative descriptive analysis method. The results of the analysis of financial statements, income tax calculations indicate that the company has not performed in accordance with Law No taxation 36 of 2008, where there is a difference in the calculation of income tax. The conclusion of this study is CV Indah Utama 171 miscalculated rate of income tax article 25 by still using the old tariff CV Indah Utama 171 should use the income tax rate 25 most recent article.

**Keywords:** Corporate Income Tax

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial dan politik, disadari perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terutang, melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum.

### 2.2 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2005, h.14) fungsi pajak dibagi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara).
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur).

### 2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2007, h.7 - 8) perpajakan teori dan kasus dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Berdasarkan penggolongannya
  - a. Pajak Langsung
  - b. Pajak Tidak Langsung
2. Berdasarkan sifatnya
  - a. Pajak Subjektif
  - b. Pajak Objektif
3. Berdasarkan lembaga pemungut
  - a. Pajak Pusat
  - b. Pajak Daerah

### 2.4 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

### 2.5 Subyek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo dan Ilyas (2009, h.17) subyek pajak penghasilan badan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subyek pajak dalam negeri

## 2. Subyek pajak luar negeri

### 2.6 Objek Pajak Penghasilan

Moljono (2007, h.19) mengemukakan bahwa definisi objek pajak penghasilan adalah: “Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan, dividen, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang”.

### 2.7 Definisi PPh Pasal 25

Menurut Resmi (2007, h.74) perpajakan teori dan kasus PPh pasal 25 merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam PPh 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pajak dalam membayar pajak terutang.

### 2.8 Tarif dan Penerapan PPh Pasal 25

Tarif Pajak PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2012 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikalikan Penghasilan Kena Pajak.

2. Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah.

### 2.9 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan adalah: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

#### 2.1.10 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan fungsi SPT adalah:

1. Sebagai Saran Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan

- pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Sebagai sarana Wajib Pajak yang melakukan pemotongan terhadap penerima penghasilan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **2.1.11 Definisi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal (1) butir 14 menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembyaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak merupakan alat bukti bagi Wajib Pajak sebagai tanda Wajib Pajak tersebut telah selesai membayar semua kewajibannya untuk membayar pajak terutang .

#### **2.1.12 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)**

Fungsi dari SSP (Surat Setoran Pajak) adalah:

1. Sebagai sarana Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Sebagai sarana Wajib Pajak dalam bukti dan laporan pembayaran pajak.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, Dharma (2008, h.15) mengemukakan sejumlah metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Historis
2. Penelitian Deskriptif
3. Penelitian Korelasional
4. Penelitian Eksperimental
5. Penelitian Kausal-komparatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci, serta mendapat data yang mendalam dari penelitian tentang analisis pajak penghasilan pasal 25 pada CV. Indah Utama 171.

#### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah analisis perhitungan pph pasal 25 dan subyek dalam penelitian ini adalah CV Indah Utama 171 yang berlokasi di Jalan Mesjid Lama No. 152 Palembang.

#### **3.3 Pemilihan Informan Kunci**

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Susanto mejabat sebagai Direktur pada CV. Indah Utama 171.

#### **3.4 Jenis Data**

Menurut Abdi (2009, h.53) jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara langsung kepada narasumber dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan perpajakan.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Hadi (2009, h.62-71) terdiri dari:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang akan penulis ambil adalah:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

#### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Hadi (2009, h.87) metode analisis terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Kualitatif
2. Data Kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk penelaahan secara sistematis dalam penerapan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dengan melakukan analisis dalam berbagai prosedur yang meliputi wawancara, penelitian dokumen atas semua prosedur di atas.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

###### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

CV Indah Utama 171 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa/travel dengan jumlah karyawan sebanyak 11 orang. CV Indah Utama 171 ini berlokasi di Jalan Mesjid Lama No. 152 Palembang dan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1995.

###### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi adalah gambaran yang memperlihatkan suatu susunan yang berkaitan erat, logis, tertib, dan memperlihatkan hubungan-hubungan yang serasi dan sesuai.

##### **4.2 Hasil Penelitian**

###### **4.2.1 Laporan Keuangan CV Indah Utama 171**

Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Peranan laporan keuangan dalam perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu perusahaan, sebab dengan adanya laporan keuangan maka

perusahaan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.

###### **4.2.2 Perhitungan Penyusutan Menurut CV Indah Utama 171**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

##### **4.3 Pembahasan**

###### **4.3.1 Perbandingan Perhitungan PPh Badan Menurut CV Indah Utama 171 dengan Ketentuan Perpajakan**

Perhitungan PPh terutang pada CV Indah Utama 171 dikenakan sebesar Rp 16.064.300 dan angsuran pajak sebesar Rp 1.338.692. Perhitungan PPh terutang tersebut menggunakan tarif 28% dari penghasilan kena pajak.

Perhitungan PPh terutang pada CV Indah Utama 171 menurut ketentuan perpajakan dikenakan sebesar Rp 14.345.125 dan angsuran pajak sebesar Rp 1.195.260. Perhitungan PPh terutang tersebut menggunakan tarif 25% dari penghasilan kena pajak dengan mengikuti aturan perpajakan terbaru seperti yang tercantum pada peraturan perpajakan.

#### **V. PENUTUP**

##### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

CV Indah Utama 171 melakukan kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 dikarenakan masih memakai tarif perhitungan pajak penghasilan yang lama yaitu sebesar 28% yang seharusnya digunakan tarif yang baru yaitu sebesar 25%, oleh karena itu terjadi selisih perhitungan dalam

laporan laba rugi yang seharusnya pajak penghasilan yang dibebankan kepada CV Indah Utama 171 sebesar Rp 14.343.125 namun yang dibayarkan sebesar Rp 16.064.300. Jadi seharusnya jika CV Indah Utama 171 menggunakan tarif pajak penghasilan yang baru maka CV Indah Utama 171 akan menghemat pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar Rp. 1.721.175,-

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. CV Indah Utama 171 harus mengikuti informasi perkembangan terbaru terkait dengan tarif peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 25 sehingga kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan badan dapat diminimalisir bahkan terhindarkan dari kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan tersebut.
2. Sebaiknya CV Indah Utama 171 menggunakan jasa konsultan pajak dalam menangani perhitungan pajak penghasilan badan ini sehingga dapat mempermudah CV Indah Utama 171 dalam mengetahui berapa besar pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan kepada kantor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Dharma, Surya 2008, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta.

Mardiasmo, Soemitro 2006, *Perpajakan*. Edisi revisi 2006. Andi Yogyakarta.

Moljono, Djoko 2007, *Pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dilengkapi*

*dengan Undang-undang*, edisi pertama, Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti 2007, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.

Suandy, Erly 2010, *Perpajakan*, edisi kedua, cetakan kedua, Salemba Empat, Jakarta.

Usman Rianse Abdi 2009, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas 2003, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.

\_\_\_\_ 2011, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan Sebagaimana yang Telah Diubah dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008*.

\_\_\_\_ 2011, Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan*. Hadi Syamsul 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Ekonosia, Yogyakarta.

\_\_\_\_ UU RI No. 28 Tahun 2007: *Tentang Perubahan Ketiga Atas UU RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

\_\_\_\_ UU RI No. 36 Tahun 2008: *Tentang Perubahan Keempat Atas UU RI No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.